

DETERMINAN AKURASI PELAPORAN ASET DAERAH

Haryanto

Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This study examines empirically internal factors (knowledge and ethical perception) and external factors (obedience pressure and task complexity) on accuration of asset reporting that was prepared by pengguna barang/kuasa pengguna barang. Sample of the study used sixty one samples to the pengguna barang/kuasa pengguna barang who took duty on local government in Indonesia. Convinience sampling method is used as sampling method. This study used questionnaire that were given directly to the pengguna barang/kuasa pengguna barang. The analyzis method was used in this study is double regression analysis. The study shows result that external factors (obedience pressure and task complexity) has no significant influence on accuration of asset reporting that was prepared by pengguna barang/kuasa pengguna barang. However the internal factors (knowledge and ethical perception) has significant influence on accuration of asset reporting that was prepared by pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Keywords: Obedience pressure, task complexity, knowledge, ethical perception, accuration of asset reporting

PENDAHULUAN

Masalah pelaporan aset daerah masih menjadi topik utama dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Salah satu hal yang diharapkan dari penyelesaian masalah pelaporan aset adalah bagaimana melakukan upaya-upaya nyata dalam membenahan atas permasalahan aset daerah khususnya aset tetap (clearance fixed assets) (BPK RI, 2012). Informasi mengenai aset daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tertuang dalam neraca. Neraca dalam LKPD suatu pemerintah daerah merupakan hasil konsolidasi/gabungan neraca seluruh laporan keuangan SKPD/UKPD (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Informasi barang milik daerah (BMD) dalam neraca terinci dalam dokumen pendukung Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Laporan Barang Pengguna/Laporan Kuasa Pengguna Barang (LBP/LKPB). Besaran nilai laporan aset daerah memberikan sumbangan yang paling signifikan terhadap seluruh laporan keuangan. LBP/LKPB sendiri merupakan gabungan dari seluruh laporan-laporan tentang keberadaan dan penggunaan barang yang ada di SKPD/UKPD (Pemerintah Republik Indonesia, 2006; Menteri Dalam Negeri, 2007). Informasi yang berasal dari LBP/LKPB tersebut berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Hal ini menjadikan pertanggungjawaban atas BMD atau aset daerah menjadi sangat penting. Keakuratan data aset daerah tentunya

sangat dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan agar dapat tersaji secara wajar (Menteri Dalam Negeri, 2007).

Dalam beberapa kasus, kewajaran pelaporan aset daerah dalam laporan keuangan ternodai dengan terjadinya kasus sengketa atas aset daerah (tanah dan bangunan) milik daerah antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang mengakui kepemilikannya. Kejadian seperti ini menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi pemerintah daerah (Indrianasari dan Nahartyo, 2008). Seperti halnya tuntutan hukum atas kepemilikan tanah akan menimbulkan dampak psikologis atas hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial atas pemerintah daerah (Dezoort dan Lord (1994) dalam Hartanto dan Wijaya (2001). Untuk mencegah berulangnya kasus sengketa atau sejenisnya atas aset daerah, pemerintah daerah dalam hal ini pengelola atau pejabat yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan dan pelaporan aset daerah dituntut untuk bersikap profesional.

Sikap profesionalisme telah menjadi isu yang kritis bagi profesi pengelola aset daerah karena hal tersebut dapat menggambarkan kinerja para pengelola aset daerah. Sikap profesionalisme pengelola aset daerah dapat dicerminkan oleh ketepatan atau akurasi dalam pelaporan aset daerah yang menjadi tanggung jawabnya (Menteri Dalam Negeri, 2007; BPK RI, 2012). Dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pengelola/pejabat yang bertanggungjawab untuk mengelola aset daerah dipersyaratkan untuk memenuhi kualifikasi tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Salah satu kualifikasi persyaratan yang diminta adalah syarat pendidikan dan pelatihan. Adanya pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan sejalan dengan peningkatan pengetahuan. Hal ini relevan dengan upaya peningkatan efektivitas dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan aset daerah.

Seorang pengelola atau pejabat (pengguna barang/kuasa pengguna barang) dalam melakukan tugasnya menyusun dan menyajikan laporan aset daerah diindikasikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Menurut Meyer (2001) dalam Jamilah dkk. (2007) diidentifikasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap profesionalisme seseorang dalam pembuatan keputusan yaitu faktor internal berupa pengetahuan dan persepsi etis dan faktor eksternal berupa tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas.

Banyaknya tekanan dalam pekerjaan dapat membuat seseorang menghadapi tekanan ketaatan. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan ekspektasi yang dihadapi oleh seseorang di dalam pekerjaannya. Kesenjangan ekspektasi tersebut terjadinya

karena adanya perbedaan antara keinginan pejabat untuk mendapatkan penilaian yang baik atas pekerjaannya dan keinginan atasan atau lingkungan atau pihak pemeriksa yang harus bertindak sesuai dengan standar yang telah didapatkannya. Dalam kondisi ini seseorang dihadapkan dalam dua pilihan apakah akan taat kepada perintah atau apakah akan taat kepada standar profesional/standar operasional prosedur yang ada. Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk dari *legitimate power*.

Pengelola atau pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset daerah merupakan sebuah profesi yang dapat menimbulkan kondisi stres dalam pelaksanaan pekerjaannya. Penelitian Miller, Mur dan Cohen (1988) dalam Murtiasari dan Ghazali (2006) menyebutkan bahwa profesi penyusun laporan pertanggungjawaban (keuangan, aset atau sejenisnya) merupakan salah satu dari sepuluh profesi yang mengandung tingkat stres tertinggi. Hal ini disebabkan karena penyusun laporan pertanggungjawaban tidak hanya harus menghadapi konflik peran tetapi juga memiliki tingkat kompleksitas tugas yang tinggi dari pekerjaan yang dihadapinya (Asih, 2010).

Bonner (2002) mengidentifikasikan bahwa kompleksitas tugas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seorang dalam membuat suatu tindakan atau keputusan. Tindakan atau keputusan dalam pelaporan aset daerah mendominasi dan memiliki nilai rupiah yang paling signifikan atas kewajaran pelaporan keuangan. Profesi yang berkecimpung dalam pelaporan aset daerah sebagai bagian pelaporan keuangan relatif memiliki kompleksitas tugas yang tinggi. Lebih lanjut Bonner (2002) mengemukakan ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk sebuah situasi pelaporan keuangan perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang yang berkecimpung didalamnya. Kedua, sarana dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas tugas pelaporan keuangan termasuk aset. Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim manajemen/pengelola aset daerah menemukan solusi terbaik bagi staf dan pengelolaan tugas (Zulaikha, 2006; Jamilah dkk., 2007; Asih, 2010).

Hasil penelitian Chung dan Monroe (2001) mengatakan bahwa kompleksitas tugas yang tinggi berpengaruh terhadap keputusan atau tindakan akan dibuat pengelola

keuangan/aset dalam hal ini pengguna barang/kuasa pengguna barang. Hal senada juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan Abdolmohammadi dan Wright (1987) mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan judgement yang dibuat seseorang (pengguna barang/kuasa pengguna barang) pada kompleksitas tinggi dan kompleksitas rendah.

Ketepatan atau akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat pengguna barang/kuasa pengguna barang didukung oleh pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan umum dan khusus, pengetahuan mengenai bidang regulasi dan keuangan/akuntansi serta pengetahuan mengenai lingkup “proses bisnis”. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh pengguna barang/kuasa pengguna barang melalui pendidikan formal, pelatihan teknis maupun pengalaman.

Libby (1995) dalam Diani dan Ria (2007) mengatakan bahwa kinerja seorang profesional dapat diukur dengan beberapa unsur antara lain kemampuan (*ability*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*). Bonner (2002) pun mengatakan profesi adalah tingkat penguasaan dan pelaksanaan dalam memberikan pelayanan atau penyelesaian atas tugasnya, yang mencakup 3 (tiga) hal yaitu: *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keahlian) dan *character* (karakter). Hal serupa juga dikatakan oleh Diani dan Ria (2007) bahwa kualitas hasil

pekerjaan seorang profesional didukung dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya.

Aspek moral juga merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Sering kali seorang profesional dihadapkan pada sebuah kondisi dilematis yang melibatkan pilihan antara pertentangan nilai-nilai etis mereka dan kewajiban mereka untuk memiliki integritas serta obyektivitas yang tinggi (Ida, 2003). Pengelola/pejabat aset daerah juga sering berhadapan dengan pengambilan keputusan yang tidak hanya cukup dengan standar pekerjaan yang ada tetapi juga kode etik.

Kesadaran etis memegang peran yang penting bagi seorang pengelola aset daerah. Dapat dikatakan bahwa etika profesi merupakan ujung tombak dari suatu profesi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa profesi pengelola aset daerah sangat membutuhkan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang harus dilaksanakannya. Sebagai profesi yang berlandaskan pada kepercayaan dan mengingat pentingnya peran pengelola aset maka etika adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa dinegosiasikan lagi (Ida, 2003).

Penelitian ini termotivasi dari Bonner (2002), Zulaikha (2006) Jamilah dkk. (2007) yang menguji pengaruh faktor insentif moneter, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas dikaitkan dengan profesi

auditor dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pola rerangka penelitian dilakukan oleh Jamilah dkk. (2007).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka penelitian ini kembali apakah faktor internal: pengetahuan persepsi etis serta faktor eksternal: tekanan ketaatan dan berpengaruh terhadap akurasi pelaporan aset tetap yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Motivasi Berprestasi

Menurut Robbins dan Judge (2007) motivasi adalah suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Sementara motivasi umum berkaitan dengan usaha untuk mencapai tujuan apapun. Tiga elemen utama dalam definisi ini yaitu intensitas, arah dan ketekunan berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Intensitas yang tinggi untuk menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan harus dikaitkan dengan arah yang menguntungkan. Ketekunan merupakan suatu ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya.

Samsudin (2005) menyatakan motivasi sebagai proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau

melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan agar terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Siegel dan Marconi (1989) motivasi merupakan kunci untuk memulai, mengendalikan, mempertahankan dan mengarahkan perilaku. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penggerak dari dalam hati seseorang dalam dirinya berarti ia mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dan pencapaian tujuan.

Motivasi adalah konsep penting bagi pengguna barang/kuasa pengguna barang, terutama dalam melakukan tugasnya. Pengguna barang/kuasa pengguna barang harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengguna barang/kuasa pengguna barang yang memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya tidak akan dipengaruhi oleh tekanan ketaatan dari atasan maupun lingkungan serta kompleksitas tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam menghasilkan suatu judgment yang relevan untuk membuat laporan aset daerah. Pengguna barang/kuasa pengguna barang yang memiliki motivasi kuat juga akan terus berusaha menambah pengetahuan baik yang diperoleh dari pendidikan formal, kursus dan pelatihan untuk mendukung kinerjanya.

Teori Penetapan Tujuan

Teori penetapan tujuan merupakan bagian dari teori motivasi yang dikemukakan

oleh Edwin Locke pada akhir tahun 1960-an (Jamilah dkk.,2007). Teori ini menegaskan bahwa niat individu untuk mencapai sebuah tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Seorang individu dengan tujuan yang sulit, lebih spesifik dan menantang akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang tidak jelas dan mudah.

Locke dan Lathan (1990) dalam Jamilah dkk., (2007) mengungkapkan bahwa terdapat dua kategori tindakan yang diarahkan oleh tujuan (*goal-directed action*) yaitu: (a) *no-consciously goal directed* dan (b) *consciously goal directed* atau *purposeful actions*. Premis yang mendasari teori ini adalah kategori yang kedua yaitu *consciously goal*, dimana dalam *conscious goal*, ide-ide berguna untuk mendorong individu untuk bertindak.

Teori penetapan tujuan mengasumsikan bahwa ada suatu hubungan langsung antara definisi dari tujuan yang spesifik dan terukur dengan kinerja: jika seseorang (manajer/pejabat) tahu apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh mereka, maka mereka akan lebih termotivasi untuk mengerahkan usaha yang dapat meningkatkan kinerja mereka (Locke dan Lathan, 1990 dalam Jamilah dkk., 2007). Tujuan yang memiliki tantangan biasanya diimplementasikan dalam output dengan level yang spesifik yang harus dicapai.

Pengguna barang/kuasa pengguna barang yang memahami tujuan dan apa yang

diharapkannya atas hasil kinerjanya, tidak akan lingkungannya dalam melaksanakan tugas yang kompleks. Pemahaman mengenai tujuannya dapat membantu pengguna barang/kuasa pengguna barang membuat suatu keputusan atau tindakan yang benar. Pejabat pengelola aset seharusnya memahami bahwa tugasnya adalah memberikan jasa profesional untuk menyajikan informasi aset daerah dengan menyusun atau membuat laporan aset daerah secara akurat. Melalui pemahaman ini pengguna barang/kuasa pengguna barang akan tetap bersikap profesional sesuai dengan etika profesi dan standar yang berlaku meskipun menghadapi rintangan dalam tugasnya.

Teori X dan Y McGregor

McGregor mengemukakan dua pandangan nyata mengenai manusia yaitu teori X (negatif) dan teori Y (positif). Individu yang bertipe X memiliki *locus of control* eksternal dimana mereka pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan, berusaha menghindarinya dan menghindari tanggung jawab, sehingga mereka harus dipaksa atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Bertentangan dengan individu bertipe X, McGregor menyebutkan individu yang bertipe Y memiliki *locus of control* internal dimana mereka menyukai pekerjaan, mampu mengendalikan diri untuk mencapai tujuan, bertanggung jawab, dan mampu membuat keputusan inovatif (Jamilah dkk., 2007).

Pengguna barang/kuasa pengguna barang yang termasuk dalam tipe X jika mendapat tekanan ketaatan dan tugas yang kompleks akan cenderung membuat tindakan atau keputusan yang kurang baik dan tidak tepat. Pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tipe ini tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya yang mengakibatkan tujuan pelaporan aset daerah tidak dapat tercapai dengan baik. Pengguna barang/kuasa pengguna barang juga lebih suka menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja, sehingga ketika mendapat cenderung mencari jalan yang aman dan bahkan berperilaku disfungsional. Sedangkan pengguna barang/kuasa pengguna barang yang termasuk dalam tipe Y dapat bertanggung jawab atas tugasnya dan tetap bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tipe ini tidak akan terpengaruh meskipun mendapat tekanan ketaatan dan menghadapi tugas audit yang kompleks, sehingga dapat membuat tindakan atau keputusan yang lebih baik dan tepat.

Tekanan Ketaatan

Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu lain. Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang dengan

perintah yang diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk legitimasi power atau kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena ada posisi khusus dalam struktur hierarki organisasi Milgran (1974) dalam Hartanto dan Wijaya (2001).

Dalam hal ini tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang dari atasan dan/atau lingkungannya untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar profesionalisme. Instruksi atasan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi perilaku bawahan karena atasan memiliki otoritas (Jamilah dkk., 2007).

Tekanan ketaatan pada lingkungan pemerintahan lebih terfokus pada tekanan yang berasal dari atasan. Tekanan ini berupa perintah atasan kepada pejabat pengelola aset daerah untuk menyajikan informasi aset daerah dengan tujuan tertentu dengan mengabaikan standar atau barang/kuasa pengguna barang yang tidak mengikuti perintah atasan dapat berupa mutasi jabatan atau sejenisnya. Sanksi tersebut lebih jauh lagi akan berdampak pada lambatnya kenaikan jenjang karir.

Kompleksitas Tugas

Pengguna barang/kuasa pengguna barang selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain. Kompleksitas adalah

sulitnya suatu tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas, dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan (Jamilah dkk., 2007). Tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas merupakan dua aspek penyusun dari kompleksitas tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi tentang tugas tersebut, sementara struktur adalah terkait dengan kejelasan informasi (*information clarity*).

Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, membingungkan, dan sulit. Beberapa tugas pengelolaan aset dipertimbangkan sebagai tugas dengan kompleksitas tinggi dan sulit, sementara yang lain mempresepsikannya sebagai tugas yang mudah. Persepsi ini menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas pengelolaan aset sulit bagi seseorang, namun mungkin juga mudah bagi orang lain. Restuningdiah dan Indriantoro (2000) menyatakan bahwa kompleksitas tugas muncul dari ambiguitas dan stuktur yang lemah, baik dalam tugas-tugas utama maupun tugas-tugas lain.

Pada tugas-tugas yang membingungkan (*ambiguous*) dan tidak terstruktur, alternatif-alternatif yang ada tidak dapat didefinisikan, sehingga data tidak dapat diperoleh dan outputnya tidak dapat diprediksi. Chung dan Monroe (2001) mengemukakan argumen yang sama, bahwa kompleksitas tugas dalam pengauditan dipengaruhi oleh beberapa

faktor yaitu: a) banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi tersebut tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan; b) adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya *outcome* (hasil) yang diharapkan oleh pemakai laporan aset dari kegiatan pengelolaan aset. Restuningdiah dan Indriantoro (2000) menyatakan bahwa peningkatan kompleksitas tugas dapat menurunkan tingkat keberhasilan tugas itu. Terkait dengan kegiatan pengelolaan aset, tingginya kompleksitas pengelolaan aset ini dapat menyebabkan pejabat pengelola aset berperilaku disfungsional sehingga menyebabkan seorang pejabat pengelola aset menjadi tidak konsisten dan tidak akuntabel. Adanya kompleksitas tugas yang tinggi dapat merusak tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pejabat pengelola aset.

Pengetahuan

Pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengenai sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Pengetahuan adalah segala maklumat yang berguna bagi tugas yang akan dilakukan. Pengetahuan menurut ruang lingkup pengelolaan aset adalah kemampuan penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang terhadap pengelolaan aset mulai dari aspek perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pencatatan sampai dengan penyusunan laporan aset daerah. Pengetahuan

pengelolaan aset diartikan dengan tingkat pemahaman pengguna barang/kuasa pengguna barang terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis.

Persepsi Etis

Pengertian persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Robbins dan Judge (2007) mengartikan persepsi adalah bagaimana orang melihat atau menginterpretasikan kejadian, objek, atau orang. Gibson (1989) memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap obyek). Persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu dapat memberikan arti secara berbeda kepada realitas objektif meskipun objeknya sama (Ida, 2003; Herawaty dan Kurnia, 2008).

Lebih lanjut Robbins dan Judge (2007) mengartikan persepsi sebagai proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Robbins dan Judge (2007) juga menyatakan bahwa perbedaan persepsi yang berbeda pada objek yang sama dapat

dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Sejumlah faktor tersebut beroperasi untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Faktor-faktor ini bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat (Ida, 2003). Faktor pada pemersepsi antara lain sikap, motif, kepentingan pengalaman, dan penghargaan. Faktor pada obyek antara lain hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Sedangkan faktor dalam situasi antara lain waktu, keadaan/tempat, kerja, dan keadaan sosial. Dalam hal pelaku persepsi, karakteristik pribadi dari pelaku persepsi akan mempengaruhi individu tersebut dalam memandang atau menafsirkan obyek.

Akurasi Pelaporan Aset Daerah

Terwujudnya akurasi pelaporan aset daerah merupakan refleksi atas pendapat, keputusan, dan pertimbangan (judgment) dari pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hogarth dan Einhorn (1992) mengartikan judgment sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. Judgment merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilhan untuk bertindak atau tidak bertindak, penerimaan informasi lebih lanjut. Judgment merupakan suatu kegiatan yang selalu

dibutuhkan oleh seorang profesional dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Setiap pengguna barang/kuasa pengguna barang dapat menghasilkan judgment yang berbeda untuk dalam melaksanakan tugas yang sama. Sehingga pengguna barang/kuasa pengguna barang harus selalu mengasah kemampuannya karena semakin handal judgment yang diambilnya maka akan semakin tinggi akurasi pelaporan aset daerah yang dibuatnya.

Pengembangan Hipotesis

Tekanan Ketaatan dan Akurasi Pelaporan Aset Daerah

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset, pengguna barang/kuasa pengguna barang secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan (Jamilah dkk., 2007). Situasi ini membawa pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam situasi konflik, dimana pengguna barang/kuasa pengguna barang berusaha untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya tetapi disisi lain dituntut pula untuk mematuhi perintah dari atasannya atau dari tuntutan lingkungan sekitarnya. Adanya tekanan pengguna barang/kuasa pengguna barang. Semakin tinggi tekanan yang dihadapi oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang

maka tindakan atau keputusan yang diambil oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang cenderung kurang tepat, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tekanan ketaatan berpengaruh secara negatif terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Kompleksitas Tugas dan Akurasi Pelaporan Aset Daerah

Kompleksitas tugas merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi akurasi pelaporan aset daerah. Pemahaman mengenai kompleksitas tugas pengelolaan aset daerah dapat membantu para pengguna barang/kuasa pengguna barang melaksanakan tugas lebih baik (Bonner, 2002). Jamilah dkk. (2007) menjelaskan terdapat dua aspek penyusun dari kompleksitas tugas, yaitu tingkat kesulitan tugas dan stuktur tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi tentang tugas tersebut, sementara struktur tugas terkait dengan kejelasan informasi (information clarity). Adanya kompleksitas tugas yang tinggi dapat merusak judgment atau tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Berdasarkan teori motivasi X dan Y, apabila dihadapkan pada suatu tugas dengan kompleksitas yang tinggi pengguna barang/

kuasa pengguna barang akan cenderung termasuk dalam tipe X. Pengguna barang/kuasa pengguna barang tersebut akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Akibatnya pengguna barang/kuasa pengguna barang tidak mampu mengintegrasikan informasi menjadi suatu laporan aset daerah yang akurat. Teori penetapan tujuan oleh Edwin Locke (dalam pengguna barang yang tidak mengetahui tujuan dan maksud dari tugasnya juga akan mengalami kesulitan ketika harus dihadapkan pada suatu tugas yang kompleks. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kompleksitas tugas berpengaruh secara negatif terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Pengetahuan dan Akurasi Pelaporan Aset Daerah

Tingkat pengetahuan yang dimiliki pengguna barang/kuasa pengguna barang merupakan hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengambil keputusan. Pengetahuan merupakan salah satu kunci keefektifan kerja (Jamilah dkk., 2007). Pengetahuan dapat didapatkan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang

baik dari pendidikan formal, seminar, pelatihan, pendidikan teknis dan pengalaman.

Dengan tingkat pengetahuan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang pengguna barang/kuasa pengguna barang maka tidak hanya akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal tetapi juga yang terpenting dapat menyajikan laporan aset yang akurat. Pengguna barang/kuasa pengguna barang yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dapat mendeteksi dan mengeliminir kemungkinan terjadinya kesalahan pelaporan aset daerah. Dengan semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang mengenai bidang pengelolaan aset daerah maka pengguna barang/kuasa pengguna barang akan semakin mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam.

Berdasarkan teori motivasi berprestasi, pengguna barang/kuasa untuk menambah pengetahuannya mendukung kinerjanya. Sehingga keahlian dan pengetahuan pengguna barang/kuasa pengguna barang akan selalu berkembang dan mendukung untuk membuat tindakan atau keputusan yang tepat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan berpengaruh secara positif terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh

pengguna barang/ kuasa pengguna barang.

Persepsi Etis dan Akurasi Pelaporan Aset Daerah

Menurut Herawaty dan Kurnia (2008), seseorang dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan pada pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil (*fair*) serta tindakan yang diambil itu harus mencerminkan kebenaran atau keadaan yang sebenarnya. Setiap pertimbangan rasional ini mewakili kebutuhan akan suatu pertimbangan yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran dari keputusan etis yang telah dibuat, oleh karena itu untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna barang/kuasa pengguna barang atas pelaksanaan etika yang berlaku dan setiap keputusan yang dilakukan memerlukan suatu ukuran (Ida, 2003; Herawaty dan Kurnia, 2008).

Pengguna barang/kuasa pengguna barang yang profesional dalam menjalankan tugasnya mengikuti standar operasional prosedur, sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya pengguna barang/kuasa pengguna barang memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil pekerjaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Persepsi etis berpengaruh secara positif terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.

METODA PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengetahuan dan persepsi etis. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah akurasi pelaporan aset daerah.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik penyampelan convenience sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menyebar sejumlah kuesioner dan menggunakan kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Sampel dalam penelitian ini adalah pengguna barang/kuasa pengguna barang di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia.

Metoda Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode kuesioner yang disampaikan kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang di mana kuesioner responden diserahkan/diantar langsung kepada responden. Pertanyaan kuesioner merupakan pertanyaan tertutup yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi deskripsi responden, merupakan uraian

responden secara demografis. Bagian kedua berisi pertanyaan dengan jawaban seberapa jauh responden setuju dan tidak setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

Metoda Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Tahap yang pertama setelah kuesioner diisi dan diperoleh dari responden dilakukan beberapa proses sebelum data diolah dalam statistik. Pemberian skor atau nilai dalam penelitian ini digunakan Skala Likert yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Skor ini digolongkan dalam lima tingkatan, yaitu:

- a). Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi nilai 5.
- b). Jawaban S (Setuju) diberi nilai 4.
- c). Jawaban N (Netral) diberi nilai 3.
- d). Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi nilai 2.
- e). Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai 1.

Tahap selanjutnya setelah kuesioner tersebut atau data yang diperoleh siap untuk diolah. Data diolah dengan bantuan Program SPSS 15.0. Metode analisis data yaitu meliputi:

Uji Regresi

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara

individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Dengan tingkat signifikansi 5 % maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai t hitung $>$ t tabel, H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika nilai t hitung $<$ t tabel, H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Secara simultan untuk menjawab hipotesis yang ada dapat ditunjukkan dengan persamaan di bawah ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

| | | |
|------------|---|---|
| Y | = | <i>audit judgment</i> |
| A | = | konstanta |
| b_1, b_2 | = | koefisien regresi untuk X_1, X_2, X_3 dan X_4 |
| X_1 | = | tekanan ketaatan |
| X_2 | = | kompleksitas tugas |
| X_3 | = | pengetahuan |
| X_4 | = | persepsi etis |
| e | = | <i>error term</i> |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Sampel penelitian diperoleh dari 61 orang pengguna barang/kuasa pengguna barang/pengurus barang/penyimpan barang

yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2012. Berikut ini dijelaskan

statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Demografi Responden

| Keterangan | | N | Minimum | Maksimum |
|---------------------|-----------|----|---------|----------|
| Umur | 48 – 54 | 61 | 48 | 54 |
| Jenis Kelamin | Laki-laki | 7 | 1 | 2 |
| | Perempuan | 54 | | |
| Tingkat Pendi Dikan | S1 | 10 | 1 | 2 |
| | S2/S3 | 51 | | |
| Masa Kerja | 20 – 29 | 49 | 20 | 29 |

Sumber: Data yang diolah

Uji Kualitas Data

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha 0,6 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas menunjukkan variabel tekanan ketaatan sebesar 0,712, kompleksitas tugas sebesar 0,814, pengetahuan sebesar 0,765 dan persepsi etis sebesar 0,854 serta akurasi pelaporan 0,723. Semua variabel diatas angka 0,6, hal ini berarti semua variabel dikategorikan reliabel.

Pengujian validitas dengan menggunakan rumus *correlation product moment* dari Pearson. Hasil uji validitas menunjukkan semua daftar pertanyaan pada semua variabel valid yang memiliki nilai lebih besar dari r tabel pada sebesar 0,252.

Ujian Asumsi Klasik

Model yang digunakan untuk menga-

nalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F. Sebelum membahas tentang analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui gangguan-gangguan atau persoalan-persoalan pada regresi linier berganda.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolonieritas menunjukkan semua nilai VIF kurang dari 10, yaitu VIF untuk variabel tekanan ketaatan sebesar 1,045; VIF untuk variabel kompleksitas tugas sebesar 1,576; VIF variabel pengetahuan sebesar 1,079; VIF variabel persepsi etis sebesar 1,592.

Mencermati hasil VIF pada semua variabel penelitian yaitu < 10 , maka data-data penelitian digolongkan tidak terdapat gangguan multikolonieritas dalam model regresinya.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi didapatkan hasil DW test (Durbin Watson test) sebesar 1,983 ($du = 1,810$; $4-du = 2,190$). Hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi, karena angka DW test berada

diantara dua tabel dan ($4-du$ tabel), oleh karena itu model regresi ini dinyatakan layak untuk dipakai.

Uji Heteroskedastisitas

Cara untuk mendeteksinya adalah dengan cara melihat grafik scatter plot antara nilai, prediksi variabel terikat ($Z-PRED$) dengan residualnya ($SRESID$). Dari hasil output asumsi heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka mengindikasikan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Model dan Hipotesis

Hasil pengujian simultan atas model regresi dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan hasil pengujian parsial (Uji t) disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.2
Hasil Uji F

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | std. Error of the Estimate |
|-------|------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .559 | .316 | .269 | 3.0389 |

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Regresi

| Model | Unstandarsized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Sig. |
|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | t | |
| 1 (Constant) | 10.818 | 7.7221 | | 1.498 | |
| Tekanan Ketaatan | -.074 | .120 | -.074 | -.059 | 0,513 |
| Kompleksitas Tugas | -.249 | .158 | -.188 | -1.618 | 0,109 |
| Pengetahuan | .229 | .108 | .249 | 2.139 | 0,025 |
| Persepsi Etis | .198 | .093 | .281 | 2.151 | 0,022 |

Persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:

$$Y = -0,074 X_1 - 0,249 X_2 + 0,229 X_3 + 0,198 X_4$$

Arah koefisien regresi X_1 (tekanan ketaatan) diperoleh memiliki arah negatif. Hal ini berarti ketaatan yang lebih ketat akan cenderung memberikan penurunan akurasi pelaporan aset daerah. Arah koefisien regresi X_2 (kompleksitas tugas) diperoleh memiliki arah negatif. Hal ini berarti kompleksitas tugas yang lebih tinggi dialami pengguna barang/kuasa pengguna barang akan cenderung mengakibatkan menurunnya akurasi pelaporan aset daerah. Arah koefisien regresi X_3 (pengetahuan) memiliki arah positif. Hal ini berarti tingkat pengetahuan yang lebih tinggi yang dimiliki pengguna barang/kuasa pengguna barang cenderung mengakibatkan meningkatnya akurasi pelaporan aset daerah. Arah koefisien regresi X_4 (persepsi etis) memiliki arah positif. Hal ini berarti bahwa persepsi pengguna barang/kuasa pengguna barang mengenai etika dan kode etik profesi yang tinggi yang dimiliki pengguna barang/kuasa pengguna barang akan cenderung mengakibatkan meningkatnya akurasi pelaporan aset daerah.

Hipotesis 1

Hipotesis H1 menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh secara negatif

terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang. Hasil Uji t diperoleh koefisien regresi untuk pengaruh tekanan ketaatan terhadap akurasi pelaporan aset daerah adalah sebesar 4,620 dengan tingkat signifikan sebesar 0,528. Tingkat signifikan $t (0,513) > \alpha (0,05)$. Hal ini berarti tekanan ketaatan tidak berpengaruh secara signifikan pada level 5 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel tekanan ketaatan tidak mempengaruhi kinerja pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam peningkatan akurasi pelaporan aset daerah. Dengan demikian hipotesis H1 dalam penelitian ini ditolak.

Walaupun hasil hipotesis H1 ini tidak signifikan tetapi hal ini mengindikasikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan yang diperoleh dari atasan maupun lingkungan tidak akan mempengaruhi pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam menyusun dan menyajikan pelaporan aset daerah.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Jamilah dkk. (2007), Hartanto dan Wijaya (2001). Menurut penelitian tersebut diisyaratkan bahwa dalam kondisi adanya perintah dari atasan dan tekanan dari lingkungan untuk berperilaku menyimpang dari standar yang ada, seorang akan cenderung mentaati perintah tersebut dan hal ini dapat mendorong

seseorang untuk bertindak atau membuat keputusan yang kurang tepat. Tekanan yang dihadapi akan menjadi pemicu dan motivator bagi seseorang untuk melaksanakan tugas yang diembannya dan kurang mengandalkan pada kaidah atau prosedur pekerjaan dan dapat berpotensi melakukan penyimpangan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Hipotesis 2

Hipotesis H2 menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh secara negatif terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang. Hasil uji t diperoleh koefisien regresi untuk pengaruh kompleksitas tugas terhadap akurasi pelaporan aset daerah adalah sebesar 4,620 dengan tingkat signifikan sebesar 0,111. Tingkat signifikansi $t(0,109) > \alpha(0,05)$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kompleksitas tugas tidak mempengaruhi kinerja pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam peningkatan akurasi pelaporan aset daerah. Dengan demikian hipotesis H1 dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Jamilah dkk. (2007) yang menunjukkan hasil penelitian senada. Jamilah dkk. (2007) menguji pengaruh kompleksitas tugas dalam pembuatan *judgment* (auditor).

Hipotesis 3

Hipotesis H3 menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh secara positif

terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang. Hasil uji t diperoleh koefisien regresi untuk pengaruh pengetahuan terhadap akurasi pelaporan aset daerah adalah sebesar 2,343 dalam tingkat signifikan sebesar 0,036. Tingkat signifikan $t(0,025) < \alpha(0,05)$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan mempengaruhi kinerja pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam meningkatkan akurasi pelaporan aset daerah. Dengan demikian hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diani dan Ria (2007) yang mengindikasikan bahwa pada tingkat kompleksitas tinggi maupun rendah, terdapat indikasi yang signifikan antara akuntabilitas dengan pengetahuan terhadap kualitas kerja. Hal ini juga berarti dapat dimaknai dengan semakin tinggi pengetahuan pengguna barang/kuasa pengguna barang maka semakin tinggi tingkat akurasi penyajian laporan aset daerah.

Hipotesis 4

Hipotesis H4 menyatakan bahwa persepsi etis berpengaruh secara positif terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang. Hasil uji t diperoleh koefisien regresi untuk pengaruh persepsi etis terhadap akurasi pelaporan aset tetap adalah

sebesar 2,144 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,036. Tingkat signifikansi t (0,022) $< \alpha$ (0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi etis mempengaruhi kinerja pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam meningkatkan akurasi pelaporan aset daerah. Dengan demikian hipotesis H4 dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuryanto dan Dewi (2001), yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman nilai-nilai etika dengan pembuatan keputusan. Hal ini juga berarti dapat dimaknai dengan semakin tinggi pemahaman atas persepsi etis pengguna barang/kuasa pengguna barang maka semakin tinggi komitmennya dalam meningkatkan akurasi penyajian laporan aset daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh simpulan sebagai berikut, pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas tidak mempengaruhi pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam membuat laporan aset daerah. Hasil statistis menunjukkan arah hubungan antara variabel tekanan ketaatan dengan akurasi pelaporan aset daerah adalah arah negatif. Hal ini konsisten dengan yang dihipotesiskan atau hal ini berarti ketaatan yang lebih ketat

akan cenderung memberikan penurunan akurasi pelaporan aset daerah. Demikian juga hal dengan variabel kompleksitas tugas, memiliki arah hubungan negatif dengan akurasi pelaporan aset daerah. Hal ini berarti kompleksitas tugas yang lebih tinggi dialami pengguna barang/kuasa pengguna barang akan cenderung mengakibatkan menurunnya akurasi pelaporan aset daerah; kedua, pengetahuan dan persepsi etis mempengaruhi signifikan akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan baik dalam pengambilan sampel maupun dalam metode yang digunakan. Keterbatasan tersebut antara lain penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 61 orang pengguna barang/kuasa pengguna barang pada pemerintah daerah di Indonesia. Keterbatasan data ini mungkin dapat menjelaskan salah satu penyebab hasil analisis tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para pemangku kepentingan di pemerintah daerah dalam pembuatan regulasi pengelolaan barang milik daerah/aset daerah khususnya pengaturan mengenai standar operasional prosedur pengelolaan barang/aset daerah. Disarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan sampel yang lebih banyak, sehingga diharapkan

hasilnya dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdolmohammadi, M dan A. Wright. 1987. An Examination of Effect Experience and Task Complexcity on Audit Judgment. *Journal of The Accounting Review*.
- Asih, Siti. 2010. Pengaruh Kompleksitas Tugas, Orientasi Tujuan dan Selfefficacy Terhadap Kinerja Auditor Dalam Pembuatan Audit Judgement. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). 2012. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2012.
- Bonner, SE. 2002. The effect of monetary incentive on effort & task performance: Theories, evidence and framework of research. *Accounting, Organization and Society*, 27 (4/5): 303-345.
- Chung, J. Dan G.S. Monroe. 2001. A Research Note on The Effect of Gender and Task Complexity on Audit Judgement". *Journal Behavioral Research*. 3. pp.111-125.
- Diani, Nelly dan Ria Mardias. 2007. The Effect of Task Complexity on Quality of Auditor's work: The Impact of Accountability and Knowledge. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol. 9. No.3.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson. 1989. Organisasi dan Manajemen Perilaku, struktur. Salemba Empat: Jakarta.
- Hartanto, Hansiandi Yuli dan Indra Wijaya. 2001. Analisis Pengaruh Tekanan Ketaatan Terhadap Judgement Auditor. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Herawaty, Arleen dan Yulius Kurnia. 2008. Profesionalisme, Pengetahuan Akuntansi Publik Dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi dan Pertimbangan Tingkat Materialitas. *Jamal* Vol. 13 No 2.
- Hogarth, H. J., dan R. M. Einhorn, 1992. Order Effects in Belief Updating: {The} Belief-Adjustment Model. *Cognitive Psychology* 24: 1-55.
- Ida, Suraida. 2003. Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman, dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian opini Akuntan Publik dalam Audit Laporan Keuangan Perusahaan. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Indriasari dan Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Jamilah, Siti., Zaenal Fanani, dan Grahahita Chandararin 2007. "Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgement". *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*.
- Murtiasari, Eka dan Imam Ghozali. 2006. Antecedent dan Konsenkuensi Burnut Pada Auditor: Pengembangan Terhadap Role Stress Model.

Simposium Nasional Akuntansi IX,
Padang, Agustus.

Simposium Nasional Akuntansi
Malang.

- Nuryanto dan Dewi. 2001. Tinjauan Etika atas Pengambilan Keputusan Auditor Berdasarkan Pendekatan Moral. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. Vol. 1 No.3, 3 Desember.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- _____.2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Restuningdiah, Nurika dan Nur Indriantoro. 1999. Pengaruh Partisipasi terhadap Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem, dan Pengaruh Pemakai Sebagai Variabel Moderating.
- Robbins, Stephen P and Judge M.H. 2007. *Perilaku Organisasi*. (judul asli: *Organizational Behavior Concept, Controversies, Application* 8th edition) jilid 1.
- Samsudin. 2005. Definisi Motivasi. <http://www.teorionline.com>.
- Siegel, Gary & Marconi, H. Ramanauskas. 1989. *Behavioral Accounting* Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing Co.
- Zulaikha, 2006. Pengaruh Interaksi Gender, kompleksitas Tugas dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgement. *Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, Agustus*.